

# EFEKTIVITAS SARANA PRASARANA POLSEK PERBATASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA

Oleh: Tim Peneliti Bid Rikwastu Puslitbang Polri

*Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polsek, maka Polsek dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti kendaraan, senjata api, sarana komunikasi dan peralatan lainnya, serta prasarana seperti bangunan dan rumah dinas. Melalui sarana dan prasarana yang disediakan itulah diharapkan tugas-tugas pelayanan dan pengamanan bisa dilakukan dengan baik, sehingga Polsek juga mampu menanggulangi setiap potensi ancaman keamanan di wilayahnya*

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara disebutkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, dan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di wilayah kecamatan. Sedangkan batas laut teritorial diambil dengan menarik garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas.

Dalam posisi yang berhadapan langsung dengan negara lain, wilayah perbatasan mempunyai posisi strategis bagi eksistensi bangsa dan negara, karena merupakan halaman depan dari keberadaan negara Indonesia. Dalam posisi yang berbatasan langsung dengan negara lain, selain persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti halnya di daerah lain, wilayah perbatasan juga memiliki potensi gangguan keamanan yang bersifat khas perbatasan, seperti masalah penetapan/perselisihan tapal batas antar negara,

penyeludupan manusia/barang, *illegal logging*, *illegal fishing*, TKI ilegal, pelanggaran keimigrasian, pencurian kekayaan negara dan sebagainya. Oleh karena itu semua permasalahan tersebut akan selalu menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ; a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum, dan c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Terkait dengan tugas pokok tersebut maka menjadi kewenangan Polri untuk melaksanakannya di kawasan perbatasan.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan itu menjadi semakin penting, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004, dalam Bab IX disebutkan bahwa program daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Dengan adanya UU tersebut maka tuntutan terhadap peran Polri dalam pengamanan daerah perbatasan semakin mendapatkan legitimasinya.

Menyadari pentingnya peran Polri dalam ikut serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, maka Polri melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/812/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Tahun 2004 – 2006 telah menetapkan sepuluh Polda perbatasan yang dibedakan menjadi dua tipologi, yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan negara lain yang meliputi Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Polda Nusa Tenggara Timur, dan wilayah yang berbatasan dengan laut negara lain, yang meliputi Polda Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Aceh, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Selain itu, dalam *grand strategy* yang telah ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, juga telah ditetapkan bahwa periode tahun 2010-2014 merupakan tahap *partnership building*, yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja Polri 2013 yang disahkan melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/324/VI/2012, tanggal 29 Jan 2012.



Patok Perbatasan RI-PNG

Sebagai pedoman dalam melaksanakan program-pro-

gram kerja di lingkungan Polri, Polri juga telah menetapkan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu sasaran strategis, sasaran prioritas dan arah kebijakan Polri. Sasaran strategis berisi 14 sasaran yang telah ditetapkan, di antaranya adalah tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat, dengan memperkuat Polsek sebagai lini terdepan pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) terutama dalam hal perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam sasaran strategis tersebut juga ditetapkan tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk.

Pada sasaran prioritas, Polri telah menetapkan 18 sasaran, antara lain adalah teratasinya gangguan keamanan di wilayah perairan, perbatasan dan pulau-

pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk yang mengganggu perekonomian negara. Adapun dalam arah kebijakan Polri antara lain disebutkan bahwa Polri meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk dalam upaya menciptakan kamtibmas yang kondusif. Selain itu juga Polri meningkatkan pengamanan di wilayah perairan dan perbatasan untuk mengatasi kejahatan internasional (*transnational crime*) yang mengganggu perekonomian negara.

Untuk mendukung program kerja tersebut, Polri kemudian mewujudkannya dalam beberapa program, antara lain program peningkatan sarana prasarana

kepolisian (yang dijabarkan ke dalam 10 kegiatan), yang tujuannya adalah untuk mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana prasarana materil, fasilitas dan jasa baik kualitas dan kuantitas, dan program pengembangan sarana prasarana kepolisian, yang di dalamnya antara lain berisi prioritas pada pengadaan materil dan sarana prasarana perbatasan, yang tujuannya adalah mendukung pelayanan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Sebagai bentuk pengejawantahan "*partnership building*", maka Puslitbang Polri mencoba melakukan upaya kerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait dengan penelitian ini antara lain dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta konsultan LIPI dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang optimal, sehingga hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai referensi pelaksanaan program pengembangan sarana prasarana Polsek Perbatasan oleh fungsi internal seperti Ssarpras Polri, terkait dengan fisik sarana prasarannya, Srena Polri terkait penyusunan anggarannya, Ssdm Polri terkait dengan pembinaan dan pengembangan SDM nya, Ssop Polri terkait pola-pola operasional yang tepat dalam menjaga Kamtibmas di Perbatasan, serta fungsi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Secara eksternal juga dapat dijadikan

referensi oleh pihak yang telah bekerjasama seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta konsultan LIPI, dalam merancang program-program pada masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan sebagai bentuk sinergitas program kementerian dan lembaga. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyelaraskan program keamanan (*security*) yang menjadi domain Polri dan kesejahteraan (*prosperity*) yang menjadi domain KKP dan BNPP yang keduanya saling terkait satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan (*comprehenship*) bukan berjalan sendiri-sendiri (*partial*).



Tim Puslitbang di Polsek perbatasan Sebantik Nunukan

Puslitbang Polri sebagai unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan program penelitian, berupaya mengkaitkan program-program yang dilaksanakan unsur lain dilingkungan Polri khususnya pengembangan sarana prasarana kepolisian, lebih spesifik lagi dengan prioritas "Pengadaan materiil dan sarana prasarana perbatasan", maka Puslitbang Polri mencoba melakukan sebuah penelitian tentang "Efektivitas Sarana Prasarana Polsek Perbatasan Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima". Penelitian ini mencoba mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada pada Polsek-Polsek Perbatasan, baik dari aspek kondisi, daya dukung terhadap kebutuhan pelayanan kepolisian, mekanisme pengadaan dan pemeliharannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sarpras di Polsek-Polsek Perbatasan, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepolisian.

## 2. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

- a. Mengidentifikasi kondisi sarpras polsek

perbatasan.

- b. Menganalisis daya dukung sarpras terhadap kebutuhan fungsi kepolisian di polsek perbatasan.
- c. Menganalisis mekanisme pengadaan dan pemeliharaan sarpras.
- d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan sarpras.

## 3. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap kondisi sarana dan prasarana Polsek yang lokasinya berbatasan dengan negara lain, baik yang berbatasan dengan laut maupun darat. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi bangunan Polsek dan perlengkapannya, yang meliputi bangunan Polsek dan ruangan-ruangannya, rumah dinas, status tanah, serta peralatan penunjang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Polsek di perbatasan, seperti kendaraan dinas, senjata api, alat komunikasi dan beberapa peralatan lain.

Satu hal yang juga penting dilihat adalah daya dukung dari sarana yang dimiliki oleh Polsek dalam mendukung pelayanan Polsek, yang meliputi pelayanan administrasi, antisipasi dan penanganan gangguan kamtibmas. Dengan diketahui daya dukung peralatan, maka akan dapat diketahui apakah peralatan yang dimiliki oleh Polsek sudah sesuai dengan kebutuhan setempat.

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut dilihat bukan hanya dikaitkan dengan ketersediaannya yang mengacu pada kondisi ideal yang sudah ditentukan, melainkan juga dilihat kondisinya dan perawatan yang dilakukan. Selain itu juga dilihat mekanisme pengadaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sarpras.

## II. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan di polsek-polsek perbatasan di tujuh Polda, yang dikelompokkan dalam dua wilayah perbatasan, yaitu wilayah yang berbatasan dengan daratan yang terdiri dari empat Polda, yaitu ; (1) Polda Kalimantan Barat, (2) Polda Kalimantan Timur, (3) Polda Papua, dan (4) Polda Nusa Tenggara Timur. Wilayah perbatasan laut yang terdiri dari tiga Polda, yaitu : (1) Polda Kepulauan Riau, (2) Polda Sulawesi Utara, dan (3) Polda Maluku Utara.

Walaupun penelitian dilakukan di Polsek perbatasan di wilayah tujuh Polda, namun oleh karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan, maka tidak semua polsek di wilayah Polda tersebut dijadikan lokasi penelitian.

## 2. Metode

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan metode disebut metodologi. Ditinjau dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan kajian epistemologi penelitian yang menyangkut bagaimana melaksanakan penelitian (Usman dan Akbar, 2003).

Metode penelitian untuk mengetahui efektivitas sarana prasarana di Polsek Perbatasan dalam mewujudkan Pelayanan Prima menggunakan metode *field research* yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner dalam hal ini diberi pengertian lebih luas yaitu meliputi kuesioner dalam arti daftar pertanyaan, tes, skala sikap dan skala penilaian, pedoman wawancara, format observasi dan lain-lain (Muhammad dan Djaali, 2003).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Telah disampaikan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam upaya memperoleh kedua data tersebut, penelitian ini menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, studi dokumen dan FGD,

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kondisi Prasarana Ruang Polsek Perbatasan

Merujuk pada lampiran **Perkap Nomor 23 Tahun 2010** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek, prototipe polsek

terbagi dalam beberapa unsur, yaitu: Pimpinan, Provost, Sium, SPKT, Intel, Reskrim, Binmas, Sabhara, dan Unsur Lantas serta Polair. Dua unsur terakhir (Lantas dan Polair) pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan, dan ditetapkan melalui keputusan Kapolri.

#### a. Polda Kaltim

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian adalah enam Polsek, yaitu dua Polsek tipe rural dan empat Polsek tipe pra rural. Di Polsek Sungai Nyamuk, semua ruangan luasnya *kurang sesuai* dengan prototipe.

Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototipe. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya.

Ruangan Kapolsek, luasnya hanya 12 m<sup>2</sup>, padahal idealnya adalah 32,4 m<sup>2</sup>. Ruang Wakapolsek yang

seharusnya 13,6 m<sup>2</sup> justru *tidak tersedia*, dan tergabung dengan ruang Kapolsek. Begitu pula ruangan untuk unsur provos. Walaupun kondisi riilnya ruang kanit 16 m<sup>2</sup> itu lebih luas dari kondisi ideal yang hanya 11 m<sup>2</sup>, namun ternyata bahwa ruangan itu dipakai bersama staf. Padahal jika digabung dengan ruang staf, idealnya luas ruang kanit provost itu 28 m<sup>2</sup>. Kondisi yang sama juga terjadi pada ruang-ruang untuk unsur-unsur yang lain, seperti ruang Sium, SPKT, Intel, Reskrim, Binmas, Sabhara, dan unsur Lantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sungai Nyamuk dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian karena kondisinya *masih baik*. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah dan ukuran Polsek *tidak memenuhi* standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras



Polsek Perbatasan Long Pujungan



Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Nunukan*, semua ruangan luasnya kurang sesuai dengan prototipe. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototipe. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya.

Ruangan Kapolsek luasnya hanya 12 m<sup>2</sup>, padahal idealnya adalah 32,4 m<sup>2</sup>. Ruang Wakapolsek yang seharusnya 13,6 m<sup>2</sup> justru tidak tersedia, dan tergabung dengan ruang Kapolsek. Begitu pula ruangan untuk unsur provost. Walaupun kondisi riilnya ruang kanit 16 m<sup>2</sup> itu lebih luas dari kondisi ideal yang hanya 11 m<sup>2</sup>, namun ternyata bahwa ruangan itu dipakai bersama staf. Padahal jika digabung dengan ruang staf, idealnya luas ruang kanit provost itu 28 m<sup>2</sup>. Kondisi yang sama juga terjadi pada ruang-ruang untuk unsure-unsur yang lain, seperti ruang Sium, SPKT, Intel, Reskrim, Binmas, Sabhara, dan unsur Lantas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Nunukan dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian karena kondisinya masih baik. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototipe Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Prasarana di *Polsek Long Pujungan*, hampir semua ruangan luasnya juga kurang sesuai dengan prototipe Polsek. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototipe Polsek. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruang unsur Sabhara sama sekali **tidak tersedia**. Ruang tahanan walaupun tersedia, namun selain luasnya jauh dari memadai, kondisinya juga **tidak layak**.

Ruang Kapolsek hanya 9 m<sup>2</sup>, jauh lebih kecil dari ruangan ideal. Wakapolsek juga tidak punya ruangan tersendiri, begitu pula untuk unsur pro-



*Polsek Penyangga Perbatasan (Polsek Mentarang)*

vost, unsur intel dan unsur Sabhara juga tidak punya ruangan tersendiri. Kondisi seperti itu tentunya bisa mengakibatkan pekerjaan **tidak dapat** dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Long Pujungan dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, walaupun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototipe Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, khusus untuk **ruang tahanan tidak layak** karena ukurannya sangat kecil.

Prasarana di *Polsek Mentarang*, hampir semua ruangan luasnya juga kurang sesuai dengan prototipe Polsek. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototipe Polsek. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Ruang tahanan walaupun tersedia, namun selain luasnya jauh dari memadai, kondisinya juga **tidak layak**. Bahwa ruang Kapolsek di Mentarang memang agak luas yaitu 24 m<sup>2</sup>, tapi itupun masih jauh di bawah prototipe Polsek. Bahkan Wakapolsek juga tidak punya ruangan tersendiri, begitu pula untuk unsur provost. Unsur-unsur lainnya memang masing-masing ada ruangan tersendiri, tetapi selain luasnya masih di bawah prototipe Polsek, juga satu ruangan masih harus berbagi antara kanit dan staf, yang menurut prototipe mestinya dipisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Mentarang dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian karena kondisinya masih baik. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah dan ukuran Polsek **tidak**



**memenuhi** standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya tidak layak, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di Polsek *Kayan Hulu* hampir semua ukuran ruangan tidak sesuai dengan prototype Polsek. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototype Polsek. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Walaupun ada ruang tahanan, tetapi ukurannya tidak memadai dan kondisinya juga tidak layak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Kayan Hulu* dan staf, prasarana Polsek yang layak digunakan hanya ruangan Kapolsek dan SPKT. Untuk jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri. Namun **masih layak** memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

#### b. Polda Sulut

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian adalah tiga Polsek, yaitu dua Polsek tipe rural dan satu Polsek tipe pra rural. Kondisi prasarana di Polsek-Polsek di bawah ini.

Semua ruangan di *Polsek Nanusa* luasnya tidak sesuai dengan prototype Polsek. Bahkan Wakapolsek juga tidak memiliki ruangan, begitu pula unsur SPKT dan unsur Lantas. Hal itu juga diperparah dengan kondisi bangunan polsek yang rusak berat, termasuk bangunan rumah dinas Polsek, sehingga tidak layak untuk digunakan. Namun dari informasi data Mapolres Talaud Polsek tersebut masuk dalam rencana rehab pada tahun anggaran 2014, dan sekarang berada dalam tahap lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Nanusa* dan staf, prasarana Polsek tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian karena kondisinya banyak yang rusak berat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.



Kantor Polsek Miangas

Di *Polsek Miangas*, semua ruangan luasnya kurang sesuai dengan prototipe. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototipe. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Memang terdapat beberapa ruangan yang kelihatannya lebih besar dari prototype Polsek. Namun jika diperhatikan, ternyata ruangan tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruang Provost sama sekali tidak tersedia. Ruang tahanan walaupun tersedia, namun luasnya jauh dari memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Miangas* dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Tabukan Utara*, kondisinya juga hampir sama dengan Polsek *Miangas*, yaitu hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Tabukan Utara* dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.



Di *Polsek Marore*, hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Pra Rural*. Beberapa ruangan bahkan digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Selain itu beberapa unit tidak memiliki ruangan, seperti unsur Provost dan unsur SPKT. Beberapa bagian bangunan yang berbahan dasar logam/besi banyak yang berkarat/korosi terkena air laut, karena *Polsek* terletak di pinggir pantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Marore* dan staf, **prasarana *Polsek layak digunakan*** untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah dan ukuran *Polsek* tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype *Polsek Prarural* yang ditentukan oleh *Ssarpras Polri*, maka sesungguhnya kondisinya tidak layak, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Kendahe*, hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Pra Rural*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Ruang staf Intel, ruang simpan BB, ruang staf Binmas dan ruang staf Sabhara tidak ada .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Kendahe* dan staf, prasarana *Polsek layak digunakan* untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran *Polsek tidak memenuhi standar* kelayakan sesuai prototype *Polsek Prarural* yang ditentukan oleh *Ssarpras Polri*, maka sesungguhnya kondisinya ***tidak layak***, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

### c. Polda Kalbar

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari *polsek-polsek* yang menjadi obyek penelitian adalah lima *Polsek*, yaitu tiga *Polsek* tipe Urban, satu *Polsek* tipe rural dan satu *Polsek* tipe pra rural. Kondisi prasarana di *Polsek-Polsek* sebagaimana di bawah ini.

Di *Polsek Sajingan Besar*, hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Rural*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan *Wakapolsek* juga tidak memiliki ruangan, begitu pula unsur SPKT . Hal itu juga diperparah dengan kondisi bagian bangunan *Polsek* yang rusak berat, termasuk bangunan rumah dinas *Polsek*, sehingga ***tidak layak***

untuk digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Sajingan Besar* dan staf, prasarana *Polsek tidak layak digunakan* untuk memberikan pelayanan kepolisian, serta jumlah dan ukuran *Polsek* tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype *Polsek Prarural* yang ditentukan oleh *Ssarpras Polri*, maka sesungguhnya kondisinya ***tidak layak***, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Paloh* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Urban*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan



*Stasiun pemancar radio Polsek Jagoi Babang*

ruang Lantai sama sekali tidak tersedia, ruang tahanan walaupun tersedia, namun luasnya jauh dari memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Paloh* dan staf, prasarana *Polsek layak digunakan* untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran *Polsek* tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype *Polsek Urban* yang ditentukan oleh *Ssarpras Polri*, maka sesungguhnya kondisinya ***tidak layak***, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Jagoi Babang* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Urban*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya, digunakan secara bersama serta kondisi ruang tahanan rusak berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek *Jagoi Babang* dan staf, prasarana *Polsek tidak layak digunakan* untuk memberikan pelayanan kepolisian, serta jumlah dan ukuran *Polsek* tidak memenuhi

standar kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Siding* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Pra Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Selain itu beberapa unit tidak memiliki ruangan, seperti unsur Provost dan unsur Sabhara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Siding dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun **jumlah dan ukuran** Polsek **tidak memenuhi** standar kelayakan sesuai prototype Polsek Pra Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Entikong* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Urban. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Banyak ruangan yang sudah **tidak layak** digunakan, Ruang Ka SPKT, Ruang Staf Tahti dan Gudang barang bukti tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Entikong dan staf, prasarana Polsek tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya **kondisinya tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Sekayam* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Beberapa ruangan yang menyatu antara lain ruang Kasium dan staf, Kanit Provost dan staf. Serta yang tidak memiliki ruangan antara lain ruang arsip, ruang staf intel, ruang pelayanan SKCK, ruang simpan BB, ruang staf Binmas dan ruang staf Sabhara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sekayam dan staf, prasarana Polsek **tidak layak**

digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, serta jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

#### d. Polda Kepri

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian adalah 10 (sepuluh) Polsek, yaitu empat Polsek tipe Urban dan enam Polsek tipe rural. Kondisi prasarana di Polsek-Polsek adalah sebagai berikut :

Di *Polsek Belakang Padang* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan unsur Provost dan Binmas tidak memiliki ruangan. Namun demikian kondisi bagian bangunan Polsek **cukup baik dan layak**, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Belakang Padang dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Nongsa* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Urban. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruang Sikum, Tahti, Sabhara dan Humas sama



Bangunan Kantor Polsek Jemaja



sekali tidak tersedia, begitupun dengan ruang tahanan juga tidak tersedia. Sedangkan untuk ruangan Provost, Binmas dan Lantas luasnya hanya dua meteran saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Nongsa dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun **jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya tidak layak, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Bunguran Barat* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Selain itu beberapa unit **tidak memiliki ruangan**, seperti unsur Provost dan unsur Sabhara. Memang ada beberapa ruangan yang kelihatannya lebih luas dari prototype Polsek Rural, namun ternyata ruangan itu digunakan secara bersama untuk ruang lainnya, yang semestinya terpisah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Bunguran Barat dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun **jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya tidak layak, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Tebing* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya seperti; staf Provost, staf Sium, staf Intel dan staf Binmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Tebing dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Bintang Utara* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Urban.



*Bangunan Kantor Polsek Tebing*

Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya seperti; staf Sium, staf Sikum, Ka SPKT, staf Intel, staf Sabhara dan staf Binmas. Untuk ruang Tahti, gudang BB dan Kasi Humas **tidak ada**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Bintang Utara dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Namun berdasarkan hasil observasi, jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Bintang Timur* kondisinya juga hampir sama, yaitu hampir semua ruangan luasnya juga tidak sesuai dengan prototype. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya seperti; staf Sium, Ka SPKT, pelayanan SKCK, Arsip, staf Binmas dan staf Sabhara. Untuk ruang Kasium, Satahti, gudang BB, Kanit Lantas dan Kasi Humas **tidak ada**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Bintang Timur dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar kelayakan** sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

#### e. Polda Nusa Tenggara Timur

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian adalah sembilan Polsek tipe rural. Kondisi prasarana di Polsek-Polsek sebagaimana di bawah ini.

Di *Polsek Amfoang Utara* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Untuk ruangan pelayanan, Arsip dan Ruang Rapat digunakan secara bersama oleh semua unsur. Kondisi bagian bangunan Polsek **kurang layak** dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Amfoang Utara dan staf, prasarana Polsek tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar



Kantor Polsek Perbatasan Motaain

kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Miomafo Barat* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost, Intel, Bimmas dan Sabhara **tidak memiliki** ruangan khusus. Untuk ruangan pelayanan, Arsip, staf dan Ruang Rapat digunakan secara bersama oleh **semua unsur**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Miomafo Barat dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Miomafo Timur* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural.

Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost, Intel, Bimmas dan Sabhara tidak memiliki ruangan khusus. Untuk ruangan pelayanan, Arsip, staf dan Ruang Rapat digunakan secara bersama oleh semua unsur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Miomafo Timur dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun **jumlah dan ukuran** Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Insana Utara* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost, Intel dan Sabhara tidak memiliki ruangan khusus. Untuk ruangan pelayanan, Arsip, staf dan Ruang Rapat digunakan secara bersama oleh semua unsur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Insana Utara dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Tasifeto Timur* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost **tidak ada**, untuk ruangan Intel bergabung dengan ruangan Reskrim dan ruangan Sabhara bergabung dengan SPKT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Tasifeto Timur dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.



Di *Polsek Raihat* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Bimmas **tidak ada**, untuk ruangan Intel bergabung dengan ruangan Reskrim dan ruangan Sabhara bergabung dengan SPKT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Raihat dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Tasifeto Barat* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan untuk ruangan Intel dan Bimmas bergabung dengan ruangan Sium. Untuk ruangan Sabhara



Kantor Polsek Insana Utara

bergabung dengan ruangan Sium dan Reskrim. Untuk Polsek perbatasan Tasifeto Barat secara type masih Rural, namun telah dibentuk Unit Lantas mengingat banyaknya terjadi laka lantas, Hal ini merupakan kebijakan Kapolres berdasarkan usulan dari kapolsek. Untuk ruangan Unit Lantas tersebut bergabung dengan unsur SPKT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Tasifeto Barat dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Lamaknen* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan

ruangan untuk unsur Provost **tidak ada**. Untuk ruangan SPKT bergabung dengan ruangan Sabhara dan ruangan Intel bergabung dengan ruangan Reskrim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Lamaknen dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya tidak layak, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Alor Timur* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural.

Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan semua ruangan para Kanit bergabung dengan ruangan staf dan ruangan Arsip serta ruang pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Alor Timur dan staf, prasarana Polsek tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan

kepolisian, serta jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

#### f. Polda Malut

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian satu Polsek tipe pra rural. Kondisi prasarana di Polsek tersebut sebagaimana di bawah ini.

Di *Polsek Morotai Utara* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Ruangan pelayanan, arsip dan ruangan rapat digunakan secara bersama oleh semua unsur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Morotai Utara dan staf, prasarana Polsek **tidak**



Ruang SPK Polsek Morotai Utara

**layak** digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, serta jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

#### g. Polda Papua

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari polsek-polsek yang menjadi obyek penelitian adalah 12 (dua belas) Polsek, yaitu satu Polsek tipe Urban, dua Polsek tipe rural dan sembilan Polsek tipe pra rural. Kondisi prasarana di Polsek-Polsek dapat sebagai berikut :

Di *Polsek Muara Tami* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Urban. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan Wakapolsek **tidak memiliki** ruangan khusus termasuk beberapa unit lainnya. Untuk ruangan Kanit Reskrim, Kanit Intel dan Sium ruangannya digabung dengan Staf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Muara Tami dan staf, prasarana Polsek layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran Polsek tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Waris* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Pra Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Waris dan staf, prasarana / bangunan Polsek **tidak ada**. Yang ada hanya rumah dinas berfungsi sebagai kantor mapolsek sehingga **tidak layak** untuk memberikan pelayanan kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kapolsek Senggi* dan staf, prasarana / bangunan Polsek **tidak layak** digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian, karena mako Polsek juga difungsikan sebagai rumah dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kapolsek Web* dan staf, prasarana / bangunan Polsek tidak ada. Yang ada hanya rumah dinas berfungsi sebagai kantor Polsek sehingga **tidak layak** untuk memberikan pelayanan kepolisian.

Di *Polsub Sektor Arso Timur* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Pra Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost, unsur Intel, unsur Binmas dan unsur Sabhara **tidak ada**. Untuk ruangan unsur Reskrim digabung dengan Staf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsub Sektor Arso Timur dan staf, prasarana Polsubsektor layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan jumlah dan ukuran tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype Polsek Pra Rural yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

Di *Polsek Onggaya* hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype Polsek Pra Rural. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Provost tidak ada. Untuk ruangan arsip SPKT, ruang staf intel, ruang pelayanan SKCK, ruang simpan BB dan ruang staf Binmas bergabung menyatu dengan ruang lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Kapolsek Onggaya dan staf, Polsek Onggaya layak dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, namun jumlah dan ukuran Polsek **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype Polsek Urban yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.



Di *Polsek Bupul* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Pra Rural*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Sabhara dan ruang tahanan tidak ada. Untuk ruangan arsip SPKT, ruang staf Provost, ruang staf intel, ruang pelayanan SKCK, ruang simpan BB, dan ruang staf Binmas bergabung menyatu dengan ruang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Bupul dan Staf, diketahui bahwa jumlah dan ukuran *Polsek* tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototype *Polsek Pra Rural* yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.



Kondisi Kantor *Polsek Perbatasan Sota*

Kondisi *Polsek Waropko Res Boven Digoel* saat ini sedang tahap pembangunan dan **tidak ada Rumdin**, sehingga kondisinya **tidak layak** untuk memberikan pelayanan kepolisian. Anggota *Polsek* tinggal di rumah sendiri namun tetap memberikan pelayanan kepolisian.

Di *Polsek Sota* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Rural*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Untuk ruangan arsip SPKT, ruang staf Provost, ruang staf Intel, ruang pelayanan SKCK, ruang simpan BB, ruang staf Sabhara dan ruang staf Binmas bergabung menyatu dengan ruang lainnya. Bahkan ruangan untuk unsur Sium **tidak ada**.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan Kapolsek Sota dan Staf, diketahui bahwa *Polsek* masih layak memberikan pelayanan kepolisian, namun jumlah dan ukuran *Polsek* **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype *Polsek Pra Rural* yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka

sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

*Polsek Muting Polres Merauke* **belum ada** bangunan kantor, sedangkan rumah dinas yang ada terdiri dari 7 (tujuh) pintu, 3 (tiga) pintu masih dapat digunakan, sedangkan yang 4 (empat) pintu dalam kondisi **rusak berat**. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Muting dan staf diketahui bahwa *Polsek* **tidak layak** memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan memfungsikan rumah dinas.

Di *Polsek Jair* kondisinya hampir semua ruangan luasnya juga kurang dari prototype *Polsek Rural*. Beberapa ruangan bahkan tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan menyatu dengan ruang lainnya. Untuk ruangan staf Sium, ruang arsip Sium, ruang SPKT, ruang pelayanan SKCK, ruang staf Sabhara dan ruang simpan BB bergabung menyatu dengan ruang lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Kapolsek Jair dan staf, diketahui bahwa *Polsek* layak dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, namun **jumlah dan ukuran** *Polsek* **tidak memenuhi standar** kelayakan sesuai prototype *Polsek Pra Rural* yang ditentukan oleh Ssarpras Polri, maka sesungguhnya kondisinya **tidak layak**, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat kurang optimal.

## 2. Kondisi Prasarana Bangunan *Polsek Perbatasan*

### a. Polda Kaltim

Status tanah *Polsek perbatasan* di Jajaran Polda Kaltim yang menjadi sampel penelitian sebagian hibah (*Polsek Sungai Nyamuk* dan *Polsek Nunukan*), sebagian milik dinas (*Polsek Sebatik Barat* dan *Polsek Kayan Hulu*), sebagian pinjam pakai (*Polsek Long Pujungan* dan *Polsek Mentaran*). Sedangkan status bangunan *Polsek* dan *Rumdin*, 4 *Polsek* milik dinas (*Polsek Sungai Nyamuk*, *Polsek nunukan*, *Polsek Sebatik Barat*, *Polsek Kayan Hulu*), 2 *Polsek* pinjam pakai (*Polsek Long Pujungan* dan *Polsek Mentaran*).

Status tanah yang pinjam pakai akan menjadi masalah jika kemudian hari diminta kembali oleh pemiliknya, terutama jika tanah itu milik perorangan. Meskipun demikian permasalahan itu kemungkinan

tidak akan muncul jika tanah yang dipinjamkan milik Pemda, karena di dalam surat pinjam pakai terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa status pinjam pakai dapat diperpanjang jika masih diperlukan.

Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin sebagian permanen (Nunukan, Sebatik Barat, Mentaran), sebagian semi permanen (Sungai Nyamuk, Kayan Hulu) dan tidak permanen (Polsek Long Pujungan). Kondisi bangunan yang tidak permanen / non standar tentu saja **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelnya, kecuali kondisi lahannya memang **tidak layak** untuk didirikan bangunan yang permanen / sesuai standar.

Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar baik dan sehat. Hanya ada 2 Polsek yang kurang baik dan kurang sehat yaitu Polsek Long Pujungan dan Kayan Hulu. Kondisi sanitasi yang **kurang baik dan kurang sehat** tentunya **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelnya.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar Polsek berada di tengah pemukiman / pusat kota kecamatan. Hanya 1 Polsek yang berada agak jauh (3 Km) dari tengah pemukiman / pusat kota kecamatan maupun jalan utama yaitu Polsek Sebatik Barat. Sedangkan jarak Kantor Polsek dengan Rumdin semuanya berdekatan (dalam satu lokasi). Lokasi Polsek yang mudah diakses oleh masyarakat akan memudahkan pelayanan yang dilakukan oleh Polsek.

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Kaltim setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, sebagian besar Polsek sudah ada baik instalasi listrik dari PLN. Khusus untuk Polsek Long Pujungan dengan PLTA dan ada 1 Polsek yang belum ada instalasi listrik yaitu Polsek Kayan Hulu, **tidak adanya instalasi listrik** tentunya **menghambat pelayanan masyarakat** terutama pada malam hari.

Sedangkan untuk instalasi air bersih, sebagian menggunakan PDAM dan sebagian instalasi sendiri. Hanya Polsek Long Pujungan yang **belum ada instalasi air bersih**, sehingga tidak memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan

kenyamanan personel. Dalam hal sarana transportasi umum baik darat dan air, sebagian ada dan lancar, tetapi sebagian lagi tidak ada (Polsek Long Pujungan). Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan biaya operasional **menjadi tinggi**.

#### b. Polda Sulut

Status tanah Polsek perbatasan di Jajaran Polda Sulut yang menjadi sampel penelitian sebagian hibah (Polsek Miangas dan Polsek Kendahe), sebagian milik dinas (Polsek Nanusa, Polsek Tabukan Utara dan Polsek Marore). Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin, empat Polsek milik dinas (Polsek Nanusa, Polsek Miangas, Polsek Tabukan Utara, Polsek Marore), satu Polsek hibah (Polsek Kendahe). Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya.

Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin seluruhnya merupakan bangunan permanen (Polsek Nanusa, Polsek Miangas, Polsek Tabukan Utara, Polsek Marore, dan Polsek Kendahe).

Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar baik dan sehat. Hanya ada dua Polsek yang kurang baik dan kurang sehat yaitu Polsek Nanusa dan Polsek Marore. Kondisi sanitasi yang kurang baik dan kurang sehat tentunya **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelnya.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar Polsek berada di tengah pemukiman / pusat kota kecamatan. Hanya satu Polsek yang berada agak jauh (4 Km) dari tengah pemukiman / pusat kota kecamatan maupun jalan utama yaitu Polsek



Kondisi Rumdin Polsek Miangas



Tabukan Utara. Sedangkan jarak Kantor Polsek dengan Rumdin semuanya berdekatan paling jauh 250 meter.

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Sulut setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, semua Polsek sudah ada baik instalasi listrik dari PLN. Sedangkan untuk instalasi air bersih, sebagian menggunakan PDAM dan sebagian instalasi sendiri. Dalam hal sarana transportasi umum darat tiga polsek tidak ada (Nanusa, Marore dan Kendahe), dan transportasi air ada tapi tidak lancar (Miangas dan Tabukan Utara). Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan **tidak dapat** dilakukan dengan cepat dan biaya operasional menjadi tinggi.

#### c. Polda Kalbar

Status tanah Polsek perbatasan di Jajaran Polda Kalbar yang menjadi sampel penelitian pada umumnya hibah hanya satu polsek yang miliki dinas yaitu Polsek Jagoi Babang. Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin, lima Polsek milik dinas (Polsek Sajingan Besar, Paloh, Jagoi Babang Siding dan Sekayam), satu Polsek hibah (Polsek Entikong). Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya.

Konstruksi bangunan Polsek seluruhnya sudah permanen (Polsek Sajingan Besar, Paloh, Jagoi Babang Siding, Entikong dan Sekayam), hanya 1 rumdin yang semi permanen (Sekayam). Kondisi bangunan yang tidak permanen / non standar tentu saja **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelnya, kecuali kondisi lahannya memang **tidak layak** untuk didirikan bangunan yang permanen / sesuai standar.

Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian **kurang baik** dan **kurang sehat**. Hanya ada dua Polsek yang baik dan sehat yaitu Polsek Entikong dan Sekayam. Kondisi sanitasi yang kurang baik dan kurang sehat tentunya **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelnya.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar Polsek berjarak 300 (tiga ratus) meter sampai dengan dua kilo meter, hanya satu polsek yang



Mako Polsek Perbatasan Jagoi Babang

berada di tengah pemukiman. Sedangkan jarak Kantor Polsek dengan Rumdin semuanya berdekatan (dalam satu lokasi).

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Kalbar setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, secara umum Polsek sudah ada instalasi listrik dari PLN. Sedangkan untuk instalasi air bersih, sebagian sudah menggunakan PDAM dan sebagian instalasi sendiri. Hanya Polsek Paloh yang belum ada instalasi air bersih. Dalam hal sarana transportasi darat tiga polsek ada tapi tidak lancar (Polsek Sajingan Besar, Paloh dan Jagoi Babang), sedangkan untuk transportasi air, tiga polsek tidak ada (Polsek Siding, Entikong dan Sekayam). Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan **tidak dapat** dilakukan dengan cepat dan biaya operasional menjadi tinggi.

#### d. Polda Kepri

Status tanah Polsek perbatasan di Jajaran Polda Kepri yang menjadi sampel penelitian sebagian milik dinas enam polsek (Polsek Belakang Padang, Nongsa, Bunguran Timur, Siantan, Bintan Utara dan Bintan Timur). Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya. Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin, sembilan Polsek milik dinas (Polsek Belakang Padang, Nongsa, Bungaran Barat, Bunguran Timur, Serasan, Siantan, Jemaja, Bintan Utara dan Bintan Timur), satu Polsek hibah (Polsek Tebing).

Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin dari 10 (sepuluh) Polsek di Polda Kepri sudah permanen (Polsek Belakang Padang, Nongsa, Bungaran Barat, Bunguran Timur, Serasan, Siantan, Jemaja, Tebing, Bintan Utara dan Bintan Timur).



Bangunan polsek perbatasan Bunguran Timur

Adapun Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar sudah baik dan sehat.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar tidak lebih dari satu kilo meter. Hanya satu Polsek yang berada agak jauh (4 Km) dari tengah pemukiman / pusat kota kecamatan maupun jalan utama yaitu Polsek Bintang Utara. Sedangkan jarak kantor Polsek dengan Rumdin bejarak antara 10 (sepuluh) meter sampai 1,5 kilo meter yang lainnya berada dalam lingkungan polsek (Polsek Jemaja dan Bintang Utara).

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Kepri setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, semua Polsek sudah ada instalasi listrik dari PLN. Sedangkan untuk instalasi air bersih, sebagian menggunakan PDAM dan sebagian instalasi sendiri/sumur tanah (Polsek Tebing, Bintang Utara dan Bintang Timur). Dalam hal sarana transportasi umum baik darat dan air, sebagian ada dan lancar, tetapi sebagian lagi **tidak ada** (Polsek Belakang Padang, Nongsa). Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan **tidak dapat** dilakukan dengan cepat dan biaya operasional menjadi tinggi.

#### e. Polda NTT

Status tanah Polsek perbatasan di Jajaran Polda NTT yang menjadi sampel penelitian sebagian besar milik dinas, hanya satu Polsek merupakan hibah yaitu Polsek Amfoang Utara. Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya. Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin seluruhnya merupakan milik dinas.

Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin seluruhnya sudah permanen (Polsek Amfoang Utara, Miomafo Barat, Miomafo Timur, Insana Utara, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifo Barat, Lamaknen dan Alor Timur).

Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar baik dan sehat. Hanya **ada dua Polsek yang kurang baik dan kurang sehat** yaitu Polsek Amfoang Utara dan Polsek Alor Timur. Kondisi **sanitasi yang kurang baik dan kurang sehat** tentunya **tidak layak** untuk pelayanan masyarakat dan kenyamanan personelya.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar Polsek berada dekat dengan pemukiman warga / pusat kota kecamatan. Sedangkan jarak Kantor Rumdin dengan Polsek paling jauh hanya 500 (lima ratus) meter.

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda NTT setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, sebagian besar Polsek sudah ada instalasi listrik dari PLN. Sedangkan untuk instalasi air bersih, sebagian menggunakan PDAM dan hanya satu Polsek yang belum ada yaitu Polsek Amfoang Utara. Sehingga tidak memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan personel. Dalam hal sarana **transportasi darat ada dan lancar**, sementara **transportasi air tidak ada**. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan **tidak dapat** dilakukan dengan cepat dan biaya operasional menjadi tinggi.



Pos Pol Wini Polsek Perbatasan Insana



#### f. Polda Malut

Status tanah Polsek dan Rumdin wilayah perbatasan di Jajaran Polda Malut yang menjadi sampel penelitian adalah hibah (Polsek Morotai Utara). Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya. Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin, sudah milik dinas.

Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin sudah permanen. Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar baik dan sehat. Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman dan jalan utama paling jauh 200 (dua ratus) meter. Jarak dengan pusat keramaian / fasilitas umum sejauh 8,5 Km. Sedangkan jarak Kantor Polsek dengan Rumdin berdekatan lebih kurang 20 (dua puluh) meter.

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Malut setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, sebagian besar Polsek sudah ada instalasi listrik dari PLN. Sedangkan untuk instalasi air bersih, sudah menggunakan PDAM. Dalam hal sarana transportasi umum darat ada dan lancar, tetapi untuk **transportasi air ada tetapi tidak lancar**, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan pelayanan.

Lokasi kantor Polsek termasuk strategis untuk pelayanan masyarakat, karena jarak dengan permukiman tidak begitu jauh, hanya sekitar 200 (dua ratus) meter. Begitu pula jarak dengan jalan utama. Namun jarak dengan pusat keramaian tergolong jauh, karena lokasi kantor Polsek berada di pulau yang jauh dari lokasi kantor Polres Halmahera Utara yang berada di kota Tobelo. Untuk penerangan kantor memang sudah ada listrik namun **menyala hanya 12 (dua belas) jam**, dari jam 18.00 sampai jam 6.00 pagi. Kondisi itu tentu saja mengganggu pelayanan di siang hari, sehingga untuk pelayanan surat-surat ke masyarakat banyak yang dilakukan **malam hari**. Ironisnya, walaupun pelayanan surat-surat dilakukan malam hari, namun siang hari petugas tetap masuk kantor, sehingga petugas mengalami **kelebihan** jam kerja.

#### g. Polda Papua

Status tanah dari sembilan Polsek perbatasan di Jajaran Polda Papua yang menjadi sampel penelitian

sangat beragam ada yang milik dinas (polsek Arso Timur, Onggaya dan Bupul), Hibah (Polsek Muaralami, Waris dan Sota), sebagian pinjam pakai (Polsek Senggi dan Web). Untuk yang status tanah hibah, menjadi tanggungjawab Polri untuk mengurus sertifikatnya.

Status tanah yang pinjam pakai akan menjadi masalah jika kemudian hari diminta kembali oleh pemiliknya, terutama jika tanah itu milik perorangan. Meskipun demikian permasalahan itu kemungkinan tidak akan muncul jika tanah yang dipinjamkan milik Pemda, karena di dalam surat pinjam pakai terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa status pinjam pakai dapat diperpanjang jika masih diperlukan.

Sedangkan status bangunan Polsek dan Rumdin, tujuh Polsek milik dinas (Polsek Waris, Senggi,



Bangunan Sub Sektor Arso Timur (Sek Arso)

Web, Arso timur, Onggaya, Bupul dan Sota), satu Polsek hibah (Polsek Muaralami) dan satu Polsek sedang dibangun serta belum memiliki rumah dinas. Konstruksi bangunan Polsek dan Rumdin lima sudah permanen (Muaralami, Waris, Senggi, Arso Timur, Onggaya Dan Sota), satu Polsek semi permanen (Bupul). Kondisi sanitasi Polsek dan Rumdin sebagian besar baik dan sehat. Hanya ada **dua Polsek yang kurang baik dan kurang sehat** yaitu Polsek Web dan Polsek Bupul.

Aksesibilitas Polsek dan Rumdin dapat dilihat dari jarak Polsek dengan pemukiman, jalan utama dan pusat keramaian / fasilitas umum. Sebagian besar Polsek berjarak 200 (dua ratus) meter. Hanya satu Polsek yang berada agak jauh (7 Km) dari tengah pemukiman / pusat kota kecamatan maupun jalan utama yaitu Polsek Senggi. Sedangkan jarak Kantor Polsek dengan Rumdin polsek senggi 4 km, tiga Polsek belum memiliki rumah dinas (Polsek Muaralami, Waris dan Onggaya), sedangkan satu Polsek Rumdin dan kantor menjadi satu yaitu polsek Web.

Kondisi infrastruktur / daya dukung Polsek dan Rumdin di Polsek-Polsek Perbatasan Jajaran Polda Kaltim setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu instalasi listrik, air bersih, sarana transportasi darat dan air. Untuk instalasi listrik, empat Polsek menggunakan Genset, dua Polsek menggunakan instalasi PLN dan **tiga Polsek belum ada instalasi listrik**. Sedangkan untuk instalasi air bersih, secara umum Polsek-Polsek tersebut menggunakan air sumur / air tanah. Dalam hal sarana transportasi darat sebagian ada dan lancar, untuk **transportasi air** umumnya **tidak ada**.

### 3. Kondisi Perlengkapan dan Sarana

#### a. Polda Kaltim

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Kaltim yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Sungai Nyamuk, Nunukan, Sebatik Barat, Long Pujungan, Mentaran dan Kayan Hulu. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut:

Jumlah peralatan dan Perlengkapan di *Polsek Sungai Nyamuk*, umumnya sangat kurang. Begitu pula dengan kendaraan R-4 dan R-2 yang dimiliki pada umumnya dalam kondisi rusak. Peralatan lainnya bisa dikatakan kecenderungan tidak ada, sebagai Polsek-Polsek yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, tidak memiliki alat transportasi air. Peralatan perkantoran seperti komputer, printer untuk menunjang kegiatan pelayanan sangat terbatas. Peralatan komunikasi berupa HT juga tidak ada. Telpn direct sebagai sarana komunikasi juga **tidak ada**. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan yang **tidak optimal**, sehingga sulit bagi Polsek untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepolisian

Kondisi Peralatan dan Perlengkapan di Polsek Sungai Nyamuk, jumlah peralatan umumnya **sangat kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada **senpi** tetapi **kenyataannya tidak ada**. Begitu pula kendaraan **R4 juga tidak ada**. Kendaraan R2 walaupun ada enam, tetapi untuk unit intel dan Reskrim malah **tidak tersedia**.

Kondisi Peralatan dan Perlengkapan di *Polsek Nunukan*, jumlah peralatan umumnya juga sangat kurang. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya tidak ada. Begitu pula kendaraan R4 juga tidak ada. Kendaraan R2 walaupun ada dua, tetapi untuk unit intel dan Reskrim malah tidak tersedia.

Kondisi Peralatan dan Perlengkapan di *Polsek Long Pujungan*, jumlah peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Begitu pula kendaraan R4 juga **tidak ada**. Kendaraan R2 walaupun ada dua, tetapi untuk unit intel dan Reskrim malah **tidak tersedia**.

Kondisi peralatan dan perlengkapan di *Polsek Mentarang*, jumlah peralatan umumnya juga **masih kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara,



Tim Puslitbang di Polsek Perbatasan Mentarang

seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Akan tetapi senpi tersebut sudah dimiliki fungsi provost, SPKT, Intel dan reskrim. Begitu pula kendaraan **R4 juga tidak ada**. Untuk kendaraan R2 dirasa cukup memadai seperti di unit provost, Sium, SPKT, Intel, Reskrim, Binmas dan Sabhara.

Kondisi peralatan dan perlengkapan di *Polsek Kayan Hulu*, jumlah peralatan umumnya juga **masih kurang**. Namun untuk peralatan senpi dirasa cukup memadai, karena sudah dimiliki oleh beberapa fungsi seperti; SPKT, Intel, Reskrim dan Sabhara. Begitu pula kendaraan R4 juga hanya ada satu. Untuk kendaraan R2 hanya sudah memiliki baru beberapa saja yaitu, Sium, Intel, Reskrim, Binmas dan Sabhara.

#### b. Polda Sulut

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Sulut yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Nanusa, Nusa Tabukan Utara, Marore dan Kendahe. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut.

Jumlah peralatan dan Perlengkapan di *Polsek Nanusa*, umumnya **sangat kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Begitu pula kendaraan



**R-4 juga tidak ada.** Kendaraan R-2 yang dimiliki ada dua namun satu dalam **kondisi rusak**. Peralatannya lainnya bisa dikatakan kecenderungan **tidak ada**, sebagai Polsek-Polsek yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, bahkan **tidak memiliki alat transportasi air**.

Kondisi Peralatan dan Perlengkapan di Polsek Nanusa, jumlah peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Begitu pula kendaraan R4 juga **tidak ada**. Kendaraan R2 walaupun ada dua, tetapi untuk unit intel dan Reskrim malah **tidak tersedia**.

Kondisi Peralatan di *Polsek Kendahe*, jumlah peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Senjata genggam di Polsek ini hanya 1 dan senjata bahu ada dua. Di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Begitu pula kendaraan R4 juga **tidak ada**. Jika dibandingkan dengan peralatan yang dibutuhkan, tampak bahwa kondisi tersebut **jauh dari memadai**. Hal itu karena senjata api genggam misalnya, kebutuhan ada delapan, dan senjata api bahu kebutuhan ada 10 (sepuluh). Begitu pula halnya dengan kebutuhan peralatan lainnya.

Kondisi peralatan di *Polsek Marore* juga sama, yaitu **sangat kurang** dari kebutuhan. Senjata genggam jumlahnya memang ada empat. Tetapi **belum semua** unit menggunakannya. Kekurangan ini juga terjadi pada peralatan lainnya, seperti motor yang hanya ada dua.

#### c. Polda Kalbar

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Kalbar yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Sajingan Besar, Paloh, Jagoi Babang, Siding dan Entikong. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut:

Dari tabel tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa kondisi Peralatan dan Perlengkapan di *Polsek Sajingan Besar*, jumlah peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Sebagai contoh di Unit Sabhara, seharusnya ada senpi tetapi kenyataannya **tidak ada**. Begitu pula kendaraan R4 juga **tidak ada** (di table ada bus kecil?). Kendaraan R2 walaupun ada tetapi sangat terbatas dan dalam kondisi **kurang baik**.

Kondisi Peralatan di *Polsek Paloh*, jumlah

peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Senjata genggam di Polsek ini hanya sembilan dan senjata bahu ada empat. Begitu pula kendaraan R4 hanya ada satu unit yang digunakan untuk patroli. Jika dibandingkan dengan peralatan yang dibutuhkan, tampak bahwa kondisi tersebut jauh dari memadai. Hal itu karena senjata api bahu misalnya, kebutuhan ada 10 (sepuluh), tapi hanya ada empat. Begitu pula halnya dengan kebutuhan peralatan lainnya.

Kondisi peralatan di *Polsek Jagoi Babang* yang bertipe Urban juga sama, yaitu **sangat kurang** dari kebutuhan. Senjata genggam jumlahnya memang ada 13 (tiga belas) pucuk dan senjata bahu ada tiga pucuk, seluruh senjata digudangkan di Polres Bengkayang. Kekurangan ini juga terjadi pada peralatan lainnya, seperti kendaraan R4 yang hanya ada satu unit yang dapat digunakan untuk patroli.



Kondisi Rumdin Polsek Jagoi Babang

Kondisi peralatan di *Polsek Siding* yang bertipe pra rural, **belum memiliki** sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

Kondisi peralatan di *Polsek Entikong* yang bertipe urban, juga **belum memiliki** sarana atau peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

Kondisi peralatan di *Polsek Sekayam* yang bertipe Rural, **belum memiliki** sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

#### d. Polda Kepri

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Kepri yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Belakang Padang, Nongsa, Tebing, Bunguran Timur, Bunguran Barat, Serasan, Siantan, Jemaja, Bintan Utara dan Bintan Timur. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut :

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek*

Belakang Padang umumnya **masih kurang**. Begitu pula dengan kendaraan **R4 juga tidak ada** sama sekali, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di *Polsek Nongsa*, jumlah peralatan umumnya juga **sangat kurang**. Senjata genggam di Polsek ini hanya delapan genggam dan senjata bahu ada lima. Begitu pula kendaraan R4 hanya ada dua unit tipe sedan yang digunakan untuk patroli. Jika dibandingkan dengan peralatan yang dibutuhkan, tampak bahwa kondisi tersebut **jauh dari memadai**, begitu pula halnya dengan kebutuhan peralatan lainnya.

Di *Polsek Bunguran Timur* yang bertipe urban, sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas



Kondisi bangunan polsek Serasan

dalam melayani masyarakat **sangat minim**. Di Polsek ini jumlah peralatan yang ada hanya satu PC dan satu printer.

Di *Polsek Bunguran Barat* yang bertipe rural, juga **belum memiliki** sarana atau peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat. Ini tercermin pada jenis alat yang hanya berupa satu PC dan satu printer. Kendaraan bermotor memang ada enam, namun **masih kurang**. Begitu pula dengan senjata yang hanya berupa senjata genggam.

Kondisi peralatan di *Polsek Serasan* yang bertipe Rural juga hampir sama, **belum memiliki** peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugas secara optimal untuk menanggulangi gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan. Peralatan yang dimiliki hanya enam motor dan enam senjata pinggang.

Di *Polsek Siantan*, peralatan yang tersedia juga masih **kurang memadai**, kecuali senjata pinggang

yang jumlahnya ada 11 (sebelas). Peralatan lainnya tidak banyak. Senjata bahu jumlahnya hanya dua, dan peralatan lain hanya berupa tiga motor.

Kondisi peralatan di *Polsek Jemaja* juga **belum memadai** untuk melaksanakan tugas secara optimal, dalam rangka menanggulangi adanya gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan. Peralatan yang tersedia hanya empat senpi pinggang dan empat motor.

Kondisi peralatan di *Polsek Tebing* juga **belum memadai**. Di Polsek ini peralatan yang tersedia hanya berupa satu bus kecil/kijang, lima PC, lima printer dan satu mesin tik.

Kondisi peralatan di *Polsek Bintang Utara* memang sudah **agak memadai**, antara lain jumlah motor ada 30 (tiga puluh), jumlah komputer juga ada 11 (sebelas), dan jumlah senpi genggam ada 23 (dua puluh tiga). Meskipun demikian senjata bahu ataupun pinggang **belum tersedia**. Begitu juga alkom.

Di *Polsek Bintang Timur*, walaupun senjata api genggam yang tersedia cukup banyak (14), namun jenis peralatan lainnya sangat minim, seperti motor hanya ada enam, bahkan **alkom** sama sekali **tidak ada**.

#### e. Polda NTT

Polsek perbatasan di Wilayah Polda NTT yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Amfoang Utara, Mimafo Barat, Mimafo Timur, Insana Utara, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Lamaknen dan Alor Timur. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Amfoang Utara* **sangat kurang**. Senjata genggam di Polsek ini hanya satu di Unit Reskrim dan senjata bahu ada satu di Unit Sabhara, Begitu pula dengan kendaraan R2 dan R4 rusak berat serta **tidak ada** alat komunikasi (HT), hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Miomafo Barat* **sangat kurang**. Senjata genggam di Polsek ini **tidak ada** dan senjata bahu ada 2 di Pimpinan, Begitu pula dengan kendaraan hanya punya 1 unit R4 rusak ringan serta ada 1 alat komunikasi (HT), hal tersebut tentu **sangat berpengaruh** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Miomafo Timur sangat kurang*. Senjata genggam di Polsek ini *tidak ada* dan senjata bahu ada dua di Unit Sabhara, Begitu pula dengan kendaraan R2 dan R4 *rusak ringan* serta *tidak ada* alat komunikasi (HT) maupun komputer, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Insana Utara sangat kurang*. Senjata genggam di Polsek ini *tidak ada* dan senjata bahu ada lima di Unit Reskrim, Begitu pula dengan kendaraan R2 dan R4 *rusak ringan* serta *tidak ada* alat komunikasi (HT), hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Diketahui bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Tasifeto Timur sangat kurang*. Senjata genggam dua pucuk dan senjata bahu 9 pucuk. Kendaraan R2 rusak berat dan R4 *rusak ringan*. Tidak ada alat komunikasi (HT) dan *tidak ada* komputer, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Raihat sangat kurang*; Senjata genggam satu pucuk dan senjata bahu lima pucuk. Kendaraan R2 rusak berat dan R4 rusak ringan. *Tidak ada* alat komunikasi (HT) dan *tidak ada* komputer, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Tasifeto Barat* sangat kurang; Senjata pinggang empat pucuk dan senjata bahu lima pucuk. Kendaraan *R2 rusak berat* dan *R4 rusak ringan*. *Tidak ada* alat komunikasi (HT), hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Lamaknen sangat kurang*. *Tidak ada* senjata genggam, hanya Senjata bahu empat pucuk. *Tidak ada* ranmor R4 dan ranmor R2 *rusak berat*. *Tidak ada* alat komunikasi (HT) dan *tidak ada* komputer, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Alor Timur* sangat kurang. Senjata genggam dua pucuk dan Senjata bahu lima pucuk. *Tidak ada* ranmor R4 dan ranmor R2 *rusak berat*. *Tidak ada* alat komunikasi (HT), hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### f. Polda Maluku Utara

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Malut yang menjadi Sampel penelitian hanya Polsek Morotai Utara. Kondisi Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut.

Bahwa jumlah senjata genggam di *Polsek Morotai Utara* hanya dua Unit, yang digunakan oleh Kapolsek dan SPK. Kendaraan Operasional bahkan *tidak ada* satu pun. Memang sebelumnya Polsek ini sudah memiliki dua kendaraan R2, namun sudah *rusak berat*, bahkan *bangkainya* sudah *tidak ada*. Alat komunikasi (HT) juga *tidak ada*, dan hanya mengandalkan pada HP anggota dengan pulsa pribadi. Memang untuk alat komunikasi di Polsek ini pernah dipasang SSB, tetapi sekarang *sudah rusak* dan *tidak bisa* digunakan sama sekali, Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka kebutuhan peralatan perlu dilengkapi.

Dari keseluruhan peralatan yang dibutuhkan tersebut, kebutuhan *speedboat* dirasakan sangat mendesak, karena untuk menjangkau desa-desa di wilayah Polsek Morotai Utara harus menggunakan sarana transportasi air.

#### g. Polda Papua

Polsek perbatasan di Wilayah Polda Papua yang menjadi Sampel penelitian meliputi Polsek Muara Tami, Waris, Senggi, Web, Arso Timur, Onggaya, Sota, Bupul, Muting, Minati, Jair dan Waropko. Kondisi masing-masing Polsek secara rinci dideskripsikan sebagai berikut :



Kondisi bangunan polsek Morotai Utara

Bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Muara Tami masih kurang/belum sesuai* DSPP. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Waris sangat kurang*. Untuk kendaraan R4 hanya satu unit kondisi *rusak ringan*, kendaraan R2 satu unit kondisi *rusak ringan*. Tidak ada HT dan Alsistor, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Senggi sangat kurang*. Senjata genggam di Polsek ini hanya satu pucuk. *Tidak ada* Ranmor, HT dan Alsistor. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Web sangat kurang*. Senjata genggam hanya satu



Kondisi bangunan sub sektor Arso Timur

pucuk, kendaraan R2 dua unit kondisi rusak ringan dan R4 satu unit kondisi rusak ringan. *Tidak ada* HT dan Alsistor, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Sub sektor Arso Timur sangat kurang*. Senjata genggam hanya satu pucuk, kendaraan R2 dua unit kondisi rusak ringan dan R4 satu unit kondisi rusak ringan. *Tidak ada* HT dan Alsistor, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Onggaya sangat kurang*. *Tidak ada* Ranmor dan HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Bupul sangat kurang*. *Tidak ada* Ranmor dan HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Waropko sangat kurang*. Senpi bahu hanya satu pucuk. Tidak ada Ranmor dan HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Sota sangat kurang*. Kendaraan R4 satu unit *rusak berat*, R2 delapan unit lima rusak ringan dan *tiga rusak berat*. Tidak ada Alsistor dan HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Peralatan dan perlengkapan di *Polsek Muting sangat kurang*. *Tidak ada* Ranmor dan HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

jumlah peralatan dan perlengkapan di *Polsek Jair sangat kurang*. Kendaraan R4 satu unit *rusak berat*, R2 empat unit *rusak ringan*. *Tidak ada* HT, hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

#### 4. Daya Dukung Sarana dan Prasarana Terhadap Kebutuhan Fungsi Kepolisian di Polsek Perbatasan

##### a. Kebutuhan Terhadap Pelayanan Kepolisian

###### 1) Pelayanan administrasi

###### a) Polda Kaltim

Pelayanan administrasi seperti pelayanan SKCK dan laporan pengaduan masyarakat, pelayanan ijin keramaian dan pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan di Polres Nunukan dan Polres Malinau (Polsek Long Pujungan, Kayan Hulu dan Mentaran) tidak ada permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit. Meskipun demikian untuk kebutuhan ATK misalnya, kurang mencukupi, terutama di Polsek Sungai Nyamuk, Sebatik Barat dan Nunukan, karena jumlah penduduk yang dilayani cukup banyak.

###### b) Polda Sulut

Pelayanan administrasi seperti pelayanan SKCK dan laporan pengaduan masyarakat, pelayanan ijin keramaian dan pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan di Polres Sangihe dan Talaud

tidak ada permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit.

**c) Polda Kalbar**

Pelayanan administrasi seperti pelayanan SKCK dan laporan pengaduan masyarakat, pelayanan ijin keramaian dan pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan di Polres Jagoi Babang dan Entikong **tidak ada** permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit.

**d) Polda Kepri**

Pelayanan administrasi seperti pelayanan SKCK dan laporan pengaduan masyarakat, pelayanan ijin keramaian dan pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan tersebut **tidak ada** permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit.

**e) Polda NTT**

Pelayanan administrasi dan laporan pengaduan masyarakat, serta pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan tersebut **tidak ada** permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit.

**f) Polda Maluku**

Pelayanan administrasi dan laporan pengaduan masyarakat, serta pelayanan umum perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek Morotai Utara **tidak ada** permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga rendah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit. Namun karena listrik yang hanya menyala pada malam hari, maka pelayanan surat-surat untuk masyarakat hanya bisa dilakukan pada malam hari. Dengan demikian beban anggota untuk melayani masyarakat **menjadi berat**, karena siang hari tetap harus berkantor.

**g) Polda Papua**

Pelayanan administrasi dan laporan pengaduan masyarakat, serta pelayanan umum

perkantoran lainnya pada umumnya di Polsek-Polsek perbatasan tersebut tidak ada permasalahan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani **juga rendah**. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang sedikit.

**2) Pelayanan antisipasi dan penanganan gangguan kamtibmas**

**a) Polda Kaltim**

Gangguan kamtibmas di Polsek Sungai Nyamuk dan Sebatik Barat yang menonjol adalah perampokan dan penangkapan ikan menggunakan trawl baik dari Malaysia maupun yang dari wilayah Nunukan. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **belum memadai**, karena seharusnya dibutuhkan peralatan kapal laut untuk mendukung patroli dan penegakan hukum atas tindak pidana di laut.

Gangguan kamtibmas di Polsek Nunukan yang menonjol adalah **narkoba, illegal logging, illegal oil** dan beberapa gangguan yang sifatnya konvensional. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek sebetulnya sudah memadai. Akan tetapi, karena sebagian wilayahnya harus ditempuh melalui jalur sungai, maka jika harus melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan yang melarikan diri melalui sungai maka petugas **mengalami kesulitan** karena **tidak adanya** sarana transportasi perahu.

Gangguan kamtibmas di Polsek-Polsek perbatasan di wilayah Polres Malinau umumnya adalah gangguan keamanan yang sifatnya konvensional, meskipun ada juga gangguan keamanan seperti tindak pidana Narkoba, pencurian kekayaan negara, illegal logging, penyelundupan binatang langka dan dilindungi



Bangunan polsek perbatasan Long Pujung

di wilayah perbatasan, dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek sebetulnya sudah memadai. Akan tetapi, karena sebagian wilayahnya harus ditempuh melalui jalur sungai, jika harus melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan yang melarikan diri melalui sungai, mendatangi TKP maka petugas mengalami kesulitan karena **tidak adanya** sarana transportasi air atau motor air (perahu motor ketinting).

Di samping peralatan transportasi air, peralatan komunikasi baik radio maupun telephone, juga **belum memiliki**. Hal ini menyebabkan sulitnya komunikasi dengan kesatuan atas. Sarana komunikasi yang biasa dilakukan adalah **menyewa telephone** satelit di wartel dengan biaya yang mahal. Sedangkan dinas tidak



Bangunan Pos Pol Aji Kuning Sek Sebatik Barat

mendukung biaya komunikasi tersebut. Kondisi-kondisi demikian menyebabkan daya dukung sarana Polsek-Polsek perbatasan menjadi **kurang optimal** dalam rangka pelayanan kepolisian.

#### b) Poda Sulut

Gangguan kamtibmas di Polsek-Polsek yang ada di Poda Sulut umumnya adalah gangguan keamanan biasa, seperti pencurian ayam, perkelahian remaja, dan orang mabuk (*Bagate*). Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek sudah cukup memadai. Meskipun demikian untuk keperluan komunikasi peralatan yang ada **sangat tidak memadai**, karena **tidak tersedia** peralatan komunikasi.

Gangguan keamanan lain adalah pencurian ikan oleh nelayan dari Filipina. Menghadapi kejahatan ini Polsek-Polsek tidak berdaya karena **tidak memiliki** kapal untuk melakukan

patroli. Bukan hanya patroli di laut, untuk berkunjung ke desa-desa lain aparat juga mengalami kesulitan karena sebagian wilayahnya harus ditempuh melalui jalur laut, sarana transportasi laut **tidak tersedia**.

#### c) Polda Kalbar

Gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek-Polsek jajaran Polda Kalbar umumnya adalah gangguan keamanan biasa (kejahatan konvensional), seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, KDRT dll. Disamping itu juga ada kejahatan *transnational crime* berupa tindak pidana penyelundupan orang dan barang, narkoba, penyelundupan flora fauna yang dilindungi dan kasus TKI ilegal. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **tidak memadai**. Untuk keperluan komunikasi, peralatan yang ada juga **tidak memadai**, karena **tidak tersedia** peralatan komunikasi, walaupun di Polsek Jagoi Babang dan Entikong misalnya, sudah ada stasiun pemancar radio namun **belum dapat** dioperasikan karena **belum dilengkapi** dengan peralatan pendukungnya, seperti Radio komunikasi baik RIG maupun *Handy Talky*. Sulitnya komunikasi juga ditengarai dengan **sulitnya signal** GSM dan CDMA.

#### d) Polda Kepri

Gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek-Polsek jajaran Polda Kepri umumnya adalah gangguan keamanan biasa (kejahatan konvensional), seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, KDRT dll. Disamping itu juga ada kejahatan *transnational* berupa tindak pidana penyelundupan orang dan barang, narkoba, penyelundupan flora fauna yang dilindungi dan kasus TKI ilegal. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **tidak memadai**. Untuk keperluan komunikasi, anggota hanya menggunakan hand phone pribadi, itupun **tidak didukung** sinyal yang bagus.

#### e) Polda NTT

Gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek-Polsek jajaran Polda NTT umumnya adalah gangguan keamanan biasa (kejahatan konvensional), seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, KDRT dll. Disamping itu juga ada kejahatan





transnational berupa tindak pidana penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kasus imigran gelap. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **tidak memadai**. Untuk keperluan komunikasi, anggota hanya menggunakan hand phone pribadi, itupun **tidak didukung** sinyal yang bagus.

f) **Polda Malut**

Gangguan Kamtibmas di Polsek perbatasan Polda Malut umumnya adalah gangguan keamanan biasa (kejahatan konvensional), seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan akibat penyalahgunaan Miras, KDRT dll. Disamping itu juga ada kejahatan transnational berupa tindak pidana penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kasus imigran gelap. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **tidak memadai**. Untuk keperluan komunikasi, **belum didukung** dengan alat komunikasi berbasis radio kontrol, anggota hanya menggunakan hand phone pribadi, itupun **tidak didukung** sinyal yang bagus.

Selain permasalahan tersebut juga terdapat gangguan keamanan yang berupa illegal fishing, baik yang dilakukan oleh nelayan dari Filipina maupun nelayan dari luar provinsi. Menghadapi kondisi tersebut petugas tidak berdaya karena **tidak memiliki** kapal untuk melakukan patroli keamanan laut. Polsek Malut pernah memiliki kapal type C, tetapi ditarik kembali ke Polres, dikarenakan ada kerusakan. Namun **sampai sekarang belum** dikembalikan ke Polsek.

g) **Polda Papua**

Gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek-Polsek jajaran Polda Papua umumnya adalah gangguan keamanan biasa (kejahatan konvensional), seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, KDRT dan lain-lain. Disamping itu juga ada kejahatan transnational berupa tindak pidana penyelundupan BBM, senjata api (Senpi), binatang yang dilindungi dan kasus perdagangan narkoba. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, perlengkapan yang dimiliki Polsek **tidak memadai**. Untuk keperluan komunikasi, anggota menggunakan radio SSB dan **hand phone pribadi**.



Kondisi Pos Pol perbatasan Ulilin, Sektor Muting

b. **Kebutuhan terhadap kesesuaian dengan kondisi wilayah**

1) **Polda Kaltim**

Kondisi wilayah di Polsek perbatasan di Pulau Sebatik (Polsek Sebatik Barat dan Polsek Sungai Nyamuk) dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sarana transportasi air merupakan yang **penting** untuk dua wilayah ini. Pada saat ini sarana transportasi air di dua Polsek tersebut **belum tersedia**. Kondisi tersebut tentunya menyulitkan kedua Polsek dalam melaksanakan tugas, terutama yang terkait dengan gangguan keamanan di laut.

Di Polsek Nunukan, walaupun umumnya wilayah daratan, namun untuk menuju wilayah yang ada di perbatasan mereka petugas harus menyusuri sungai. Oleh karena pada saat ini Polsek **belum memiliki** sarana transportasi sungai, akibatnya pelaksanaan tugas di perbatasan **tidak dapat** dilaksanakan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, jika akan menuju perbatasan mereka melakukannya dengan cara **menumpang perahu** milik masyarakat.

Dihadapkan pada kondisi geografis yang sangat sulit terjangkau dan terisolir, **tidak adanya infrastruktur** jalan yang menghubungkan antar Polsek-Polsek perbatasan jajaran Polres Malinau, yaitu Polsek Long Pujungan, Kayan Hulu dan Mentaran, transportasi sungai dan transportasi udara yang sangat rendah frekwensinya, terkadang **harus menyewa (charter)** dengan **biaya tinggi**, maka kebutuhan yang **sangat diperlukan** sesuai dengan kondisi tersebut adalah terpenuhinya sarana transportasi berupa motor air (perahu motor ketinting).

## 2) Polda Sulut

Kondisi wilayah di Polsek-Polsek perbatasan di Sangihe dan Talaud umumnya dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu maka kebutuhan terhadap sarana **transportasi air** merupakan yang penting untuk dua wilayah ini. Pada saat ini sarana transportasi air di Polsek-Polsek tersebut **belum tersedia**. Kondisi tersebut tentunya menyulitkan aparat dalam melaksanakan tugas, terutama yang terkait dengan gangguan keamanan di laut.

## 3) Polda Kalbar

Kondisi geografis wilayah di Polsek-Polsek perbatasan di Sambas, Bengkayang dan Sanggau umumnya **masih terisolir** dan **minimnya infrastruktur jalan** dan **sarana transportasi** yang menghubungkan antar Polsek dan Polres. Kondisi tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri bagi anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas, terutama yang terkait dengan gangguan keamanan *transnational crime*.

## 4) Polda Kepri

Sebagian besar wilayah di Polsek-Polsek perbatasan di Polda Kepri umumnya merupakan wilayah perairan. Akan tetapi, hampir semua polsek tersebut **tidak didukung** dengan transportasi air. Hal tersebut menyulitkan anggota untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal. Apa lagi jika harus mengantisipasi munculnya gangguan keamanan berupa *illegal fishing*.

## 5) Polda NTT

Sebagian besar wilayah di Polsek-Polsek perbatasan di Polda NTT umumnya merupakan wilayah daratan. Akan tetapi, hampir semua polsek tersebut **tidak didukung** dengan transportasi darat yang sesuai dengan karakteristik geografis wilayahnya. Hal tersebut menyulitkan anggota untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal.

## 6) Polda Maluku

Sebagian besar wilayah di Polsek Morotai Polda Maluku merupakan wilayah lautan, dan untuk menuju ke desa-desa harus ditempuh menggunakan transportasi laut, karena jalan darat yang kondisinya **tidak layak**. Namun sarana transportasi laut **tidak tersedia**, sehingga aparat mengalami kesulitan untuk mencapai desa-desa di wilayahnya.

## 7) Polda Papua

Sebagian besar wilayah di Polsek-Polsek perbatasan di Polda Papua umumnya merupakan wilayah daratan. Akan tetapi, hampir semua Polsek tersebut **tidak didukung** dengan transportasi darat dan alkom yang sesuai dengan karakteristik



Bangunan Pos Pol perbatasan Uililin, Sektor Muting

geografis wilayahnya. Hal tersebut menyulitkan anggota untuk melaksanakan tugas secara optimal.

## 5. Mekanisme pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

Mekanisme pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada masing-masing wilayah, yaitu di 7 (tujuh) polda yang menjadi sasaran penelitian secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Polri mengacu pada Perpres Nomor 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Secara normatif, Satker di lingkungan Polri pada level Polda dan Polres dapat menyelenggarakan proses pengadaan sendiri seperti prasarana Polsek berupa pembangunan kantor Polsek dan rumah dinas Polsek. Dengan catatan bahwa Polres setempat mengajukan usulan anggaran pembangunan Polsek dan rumah dinas. Dalam implementasinya jika anggaran pembangunan Polsek dan rumah dinas tersebut disetujui dan turun dalam bentuk DIPA, maka Kapolres dapat membentuk kepanitiaan atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proses pengadaan. Jika terkendala dengan **tidak adanya** personel yang memiliki kemampuan dan sertifikat pengadaan dari LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka dapat meminta bantuan personel yang kompeten dari Polda atau dinas PU setempat. Dalam hal pengadaan peralatan kepolisian seperti senjata api, kendaraan bermotor (R2 dan R4), peralatan komunikasi, sampai saat ini **masih tersentral** di Ssarpras Mabes Polri.

- b. Untuk pembangunan prasarana Polsek, mekanisme yang dilakukan ada dua jalur. Pertama, Polres mengusulkan ke Polda tentang kebutuhan pembangunan prasarana. Untuk itu jika disetujui, anggarannya berada di dalam DIPA Polres. Kedua, berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Polda, maka Polda juga bisa mengusulkan pembangunan prasarana di Polsek perbatasan. Untuk itu maka anggarannya berada di dalam DIPA Polda. Jika pembangunan prasarana diajukan oleh Polsek, maka salah satu persyaratan yang diperlukan **lahan siap bangun**.
- c. Untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan dari Polres memang diberi peluang untuk menguskannya. Meskipun demikian, oleh karena pemberian peralatan itu dilakukan melalui system pengiriman dari Mabes Polri, maka peralatan yang diberikan **tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan. Pengiriman peralatan hanya sampai di Polda, dan **tidak ada biaya** untuk pengiriman peralatan dari Polda ke Polres dan Polsek (titik bekal).

#### 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sarpras

Secara garis besar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang ada di 7 (tujuh) Polda yang menjadi sampel penelitian, sangat dipengaruhi oleh model pengadaan yang tersentralisasi. Sistem pengadaan yang tersentralisasi tersebut sisi positifnya adalah akan menghemat anggaran atau efisien untuk penyelenggaraan pengadaan peralatan tersebut. Sisi positif lainnya adalah jaminan ketersediaan peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan.

Sisi negatifnya, terkadang peralatan yang di kirim ke masing-masing satuan kewilayahan sampai pada level Polsek **tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan / diperlukan dalam mendukung pelayanan kepolisian sesuai karakteristik kewilayahan. Misalnya wilayah yang strukturnya lebih membutuhkan motor air / speed boat, tetapi karena pengadaan di pusat adalah

kendaraan patroli (R2/R4), maka yang di kirim ke satuan kewilayahan adalah kendaraan patroli. Sedangkan kebutuhan yang lebih sesuai adalah speed boat/kapal patroli. Sisi negatif lainnya anggaran pendistribusian **tidak sampai** ketitik bekal.

Terkait dengan hal tersebut maka terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Polsek perbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana Polsek, yaitu :

- a. Karena pengusulan anggaran untuk pembangunan Polsek tidak dapat diusulkan dalam DIPA jika belum ada bukti kepemilikan lahan yang akan didirikan bangunan Polsek, sementara penganggaran pembangunan Polsek **tidak termasuk** dengan pembelian tanahnya, maka beberapa bangunan Polsek **belum bisa** dibangun secara permanen.
- b. Biaya pemeliharaan dan perawatan **tidak terpenuhi** sebanyak peralatan yang ada termasuk dukungan BBM. Untuk mengatasi hal tersebut maka perawatan bangunan kantor Polsek dilaksanakan **secara swadaya**.
- c. Anggaran untuk pembangunan Polsek berdasarkan DIPA yang teralokasi **tidak sesuai** dengan usulan. Menghadapi kondisi tersebut maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Polsek perbatasan. Pertama, prasarana tetap dibangun sesuai dengan yang diusulkan, **tetapi kekurangannya** dipenuhi secara swadaya. Kedua, prasarana dibangun **tidak sesuai** dengan standar kualitas dan / atau kuantitas.
- d. Pengiriman peralatan hanya sampai di Polda, dan **tidak ada biaya** untuk pengiriman peralatan dari Polda ke Polres dan Polsek (titik bekal). Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak Polres dan Polsek mengupayakan **secara swadaya**.
- e. Untuk Polsek yang wilayahnya membutuhkan sarana transportasi air, baik untuk transportasi



Kondisi Polsek Perbatasan Amfoang

personel ataupun untuk operasional kepolisian. Ketiadaan sarana tersebut sangat menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi hal tersebut petugas **meminjam / menyewa** perahu dari masyarakat.

- f. **Kurangnya peralatan** komunikasi menyulitkan petugas untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas. Untuk mengatasi hal tersebut para anggota melakukan komunikasi dengan menggunakan **biaya sendiri** (telepon seluler milik pribadi atau telepon satelit) itupun apabila sinyalnya mendukung.

#### IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

##### 1. Kesimpulan

###### a. Kondisi Sarana dan Prasarana

###### 1) Kondisi Sarana

Kondisi sarana / peralatan dan perlengkapan Polsek-Polsek perbatasan tidak layak baik secara kuantitas maupun secara kualitas seperti senjata api, kendaraan patroli baik roda dua maupun roda empat, peralatan transportasi / patroli air (untuk wilayah perbatasan laut), peralatan komunikasi serta peralatan perkantoran umum.

###### 2) Kondisi Prasarana

- a) Kondisi prasarana kantor dan rumah dinas Polsek-Polsek perbatasan sebagian besar tidak memenuhi standar kelayakan sesuai prototipe Polsek yang ditentukan oleh Ssarpras Polri baik ukuran maupun bagian-bagian ruangnya. Kondisi ini terjadi pada semua tipe, baik tipe Urban, Rural maupun Pra Rural.
- b) Status tanah Polsek sebagian besar milik Polri namun ada yang masih berstatus **pinjam pakai**. Demikian juga status tanah rumah dinas.
- c) Status bangunan Polsek sebagian besar milik Polri namun ada yang masih berstatus pinjam pakai. Demikian juga status bangunan rumah dinas.
- d) Konstruksi bangunan Polsek sebagian besar permanen namun ada sebagian yang tidak permanen. Bahkan ada yang **belum memiliki** bangunan rumah dinas.
- e) Kondisi sanitasi Polsek dan rumah dinas sebagian besar sehat dan baik, hanya sebagian kecil yang **kurang sehat** dan

**kurang baik.**

- f) Sebagian besar bangunan Polsek sudah terpasang instalasi listrik dari PLN, namun sebagian kecil ada yang masih menggunakan genset, begitu pula dengan rumah dinas.
- g) Sebagian besar Instalasi air bersih bangunan Polsek bersumber dari PDAM / air sumur, namun sebagian belum memiliki instalasi air bersih. Begitu juga bangunan rumah dinas.
- h) Sebagian besar Polsek tersedia sarana transportasi darat/transportasi air yang lancar. Meskipun demikian ada yang **tidak lancar**.

###### b. Daya dukung sarana prasarana

Daya dukung sarana prasarana terhadap kebutuhan fungsi-fungsi kepolisian dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat menjadi **tidak optimal**, sehingga sulit bagi Polsek-Polsek perbatasan untuk menyelenggarakan pelayanan prima.

###### c. Mekanisme pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

Mekanisme pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Polri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang merupakan perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Secara normatif, satker di lingkungan Polri pada level Polres dan Polda **dapat menyelenggarakan** proses pengadaan sendiri seperti prasarana polsek berupa pembangunan kantor Polsek dan rumah dinas Polsek.

###### d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

- 1) Pengajuan anggaran pembangunan Kantor Polsek dan rumah dinas ke Mabes Polri **harus disertai** dengan kesiapan lahan yang sudah bersertifikat hak milik (SHM). Sedangkan Polri **tidak ada** anggaran / DIPA untuk pembelian tanah / lahan. Kondisi itu berakibat banyak Polsek yang tidak dapat dibangun.
- 2) **Tidak ada** dukungan anggaran / biaya untuk pendistribusian sarana / peralatan dari Polda ke Polsek-Polsek wilayah perbatasan. Kondisi ini **sangat membebani** Polsek yang mendapatkan dropping peralatan karena Polsek juga **tidak memiliki** alokasi anggaran untuk hal tersebut.



- 3) Dropping sarana / peralatan yang dikirim dari pusat / Mabes Polri seringkali **tidak sesuai** dengan pengajuan rencana kebutuhan serta karakteristik wilayah Polsek-Polsek perbatasan. Akibatnya peralatan tersebut **tidak dapat** berfungsi secara optimal dalam rangka mendukung pelayanan kepolisian.
- 4) Dukungan biaya pemeliharaan dan perawatan prasarana kantor dan rumah dinas **belum terpenuhi** sesuai kebutuhan sehingga mengurangi usia pakai. Demikian halnya dengan kebutuhan BBM untuk operasional kendaraan yang ada juga **belum terpenuhi**, sehingga penyelenggaraan operasional dan pelayanan kepolisian **tidak dapat** berjalan secara optimal.

## 2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Kapolri up. Asrena Kapolri dan Assarpras Kapolri sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sarana menyulitkan anggota Polsek-Polsek perbatasan untuk melaksanakan pelayanan kepolisian secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada **supaya dilengkapi** sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

- b. Banyak kantor Polsek yang masih layak pakai. Meskipun demikian jumlah dan luas ruangan yang tersedia **tidak sesuai** dengan prototipe berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Untuk itu kebutuhan jumlah dan luas ruangan perlu dipenuhi sesuai dengan Perkap tersebut.
- c. Pemilikan lahan yang statusnya pinjam pakai **perlu ditingkatkan** statusnya **menjadi hibah** sebagai dasar untuk pengurusan sertifikat kepemilikan lahan.
- d. Perlu **pemetaan ulang** kebutuhan riil sarana dan prasarana Polsek perbatasan sebagai dasar usulan pengadaan.
- e. Polsek-Polsek perbatasan yang wilayahnya berbatasan dengan perairan laut/sungai **agar dilengkapi** sarana **transportasi air** sesuai kebutuhan.
- f. Pengadaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan oleh daerah **agar didesentralisasi**, jika tetap dilaksanakan secara sentralisasi **agar didukung** dengan biaya pengiriman sampai ke titik bekal.

## Info Sehat

### Jangan Remehkan Varises

**C**hronic venous disease atau dikenal dengan varises, jika tak ditangani dengan serius, beresiko menjadi luka borok yang tak kunjung sembuh. Bagaimana mencegah agar tak kena varises ?.

Varises sepertinya masih sering diabaikan masyarakat Indonesia.

Padahal, penyakit ini tergolong mematikan. Angka kejadian secara global varises mencapai 7% dengan insiden kasus baru per tahunnya mencapai 0,22%. Di tanah air datanya memang masih simpang siur. Namun, di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, prevalensinya terus meningkat. Diketahui, wanita dewasa memiliki resiko 25%-50% mengalami varises.

Sementara pria memiliki risiko terkena varises lebih



rendah, yaitu berkisar pada 15%-30%. Risiko varises meningkat pada mereka yang terlalu lama duduk atau berdiri, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, hamil, merokok dan faktor genetik.

Perubahan hormonal saat menopause, riwayat varises dalam keluarga, riwayat penyakit pada

vena, seperti tromboflebitis (peradangan pembuluh vena) juga bisa memperparah. Varises merupakan pembuluh darah vena yang membesar, membengkak, dan berkelok-kelok. Biasanya berwarna biru atau ungu gelap, di kaki akibat tersumbat atau berkurangnya tonus otot.

Vena merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk mengembalikan darah dari tubuh ke jantung. “ Selain mengurangi keindahan penampilan fisik,

varises juga menimbulkan rasa nyeri, pegal, kram dan dapat menimbulkan bengkak pada kaki. Jika varises ini tidak ditangani secara serius, penderitanya bisa mengalami luka borok yang tak kunjung sembuh. Lebih parahnya lagi, pasien bisa mengalami kematian akibat terserang emboli paru (*pulmonary embolism/PE*).

Emboli paru merupakan penyumbatan arteri paru-paru oleh suatu embolus (bekuan darah) yang terjadi secara tiba-tiba dan bisa mengakibatkan kematian secara mendadak. Meski terbilang mematikan, penyakit lanjutan dari varises bisa dicegah. Salah satu cara pencegahan penyakit varises ini, lanjut dia, dengan merawat kaki.



Perawatan kaki dapat dilakukan dengan melakukan olah raga ringan, seperti berenang, jalan santai, *hydrotherapy* (berjalan di air) bersepeda, yoga, dan jogging secara teratur minimal 30 menit sehari. Tujuannya untuk melatih otot kaki, yang rentan muncul varises. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan tidak menggumpal.

Selain berolah raga secara teratur, agar mengurangi pemakaian sepatu dan sandal bertumit atau ber hak tinggi. Penggunaan alas kaki berhak tinggi dapat mempercepat munculnya varises di usia dini. Hal ini disebabkan kaki mendapatkan tambahan beban kerja.

Maka dari itu, jangan menyiksa kaki dengan memakai sepatu hak tinggi terlalu lama. Bukan cuma sepatu hak tinggi, pemakaian yang terlalu ketat di sekitar kaki dan pinggul juga akan meningkatkan risiko munculnya varises. Jadi sebaiknya kenakan pakaian yang nyaman dan longgar setiap hari. Kebiasaan duduk secara bersila dan duduk dengan lutut ditekuk dalam kurun waktu cukup lama yang dapat membuat

aliran pembuluh darah vena terhambat juga mesti dikurangi untuk mencegah varises. Dapat juga menggunakan *medical stocking* ini juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Selain itu, *medical stocking* dapat mengurangi pembengkakan pada kaki, seperti kram, pegal, dan bengkak. Agar pemakaian *medical stocking* ini efektif, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis bedah vaskuler.

#### **Mencegah Varises**

Varises sudah terlanjur muncul terkadang susah dihilangkan. Nah agar varises tak muncul, cegah dengan berbagai cara berikut ini :

**Olah Raga** setiap hari. Terlalu lama duduk atau berdiri bisa memicu timbulnya varises. Jadi jika tak ingin mengalaminya, harus lebih sering berolah raga. Dengan begitu aliran darah menjadi lebih lancar dan tidak menggumpal.

**Hindari** pakaian ketat. Bukan Cuma sepatu hak tinggi, pakaian yang terlalu ketat di sekitar kaki dan pinggul juga akan meningkatkan risiko munculnya varises. Jadi, sebaiknya kenakan pakaian yang nyaman dan longgar setiap hari.

**Makan** makanan berserat tinggi, seperti sayuran, buah, dan sereal. Makanan jenis ini akan memperlancar buang air besar. Sebaliknya, jika kurang mengonsumsi makanan berserat, maka bisa menyebabkan sembelit.

**Konsumsi** *cherry* dan *blackberry*. Varises bisa dihilangkan dengan cara memperbanyak konsumsi buah *blackberry* dan *cherry*. Sebab dalam buah tersebut terkandung senyawa yang sifatnya melancarkan peredaran darah.

**Jangan** gunakan sepatu hak tinggi terlalu lama. Penyebab lain dari timbulnya varises, yaitu pemakaian sepatu hak tinggi. Maka dari itu, jangan menyiksa kaki dengan memakai sepatu hak tinggi terlalu lama.

**Kurangi** berat badan. Kegemukan menambah beban vena karena memiliki darah yang lebih banyak untuk dilahirkan oleh vena. Anda juga kurang gerak sehingga memiliki otot-otot yang kurang mampu untuk mendukung pekerjaan vena.

*Koran Sindo, Edisi Juni 2014*